

TRANSKIP WAWANCARA

Judul Tesis : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Kasus pada Kampung Srer).
Peneliti : Vebby Rosalina Kareth
Informan : **Kepala Kampung.**
Jenis : *In-depth Interview*
Tempat/Waktu: , Tanggal, Jam: s/d

Deskripsi

Vebby : Ok baik baik. e Saya akan e melakukan wawancara terkait judul tesis Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Kasus pada Kampung Srer). e Informasi penelitian ini yaitu aparat desa (Kepala kampung, sekertaris desa dan bendahara). Jenis e penelitian yaitu *In-depth Interview* . waktu dan tanggal disesuaikan. Berdasarkan proses pengelolaan keuangan disini ada 5 bagian yaitu; perencanaan, pelaksanaan, piñntausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban . Disini suda ada bapak e kepala kampung, mungkin bapak bisa perkenalkan nama dan jabatan. Silakan.

KPK ; Iya baik. Terima kasih kesempatan diberikan, mungkin perkenalkan diri. Nama saya markus serekeya. Kepala kampung terpilih, kepala kampung definitif. Terpilih 5 februari eh.. 5 Desember 2019. Dan saya sebagai kepala kampung resmi atau definitif telah dilantik pada 7 Februri 2020 dan saya selaku kepala kampung srer adalah kepala kampung definitif masa periode 6 tahun. Dan disini saya sebagai kepala kampung yang baru mungkin memperkenalkan dalam tahun ini baru melaksanakan tugas sebagai pemerintah kampung, pertama-tama yang menjadi e.. tanggungjawab adalah sebagai pemimpin, jadi saya mungkin minta untuk dukungan bersama oleh semua warga masyarakat, tokoh-tokoh intelektual, pemuda, tokoh awam untuk sama-sama mendukung saya sebagai pemimpin dan mungkin kekurangan saya, mungkin bisa di bantu. ya mungkin demikian untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai kepala kampung sudah berkeluarga, 1 istri dan 1 anak. Mungkin demikian.

Vebby ; Ok baik. e kita akan masuk langsung pada pertanyaan terkait proses e pengelolaan keuangan desa di desa srer dan e perlu diinformasikan bahwa kepala kampung ini adalah kepala kampung baru dan baru menjabat dan e berdasarkan pengalamannya sebelumnya adalah e ketua BAPERKAM dan emm kita langsung saja pada pertanyaan dari pada e apa proses pengelolaan keuangan di desa sre...eh.. di kampung srer, maaf di kampung srer.

Yang pertama yaitu terkait perencanaan. e dalam perencanaan ini bapa kepala kampung, e bagaimanakah proses awal dari pada penyusunan APBDes edari awal sehingga sampai pada APBDes ini sudah jadi. Yang di lakukan oleh perangkat desa terkait dalam pengelolaan keuangan ini. Mungkin bapa bisa e jawab sesuai dengan apa yang selama ini terjadi. Sesuai dengan keadaan real.

KPK : Iya baik terima kasih. Mungkin terkait dengan proses penyusunan APBDes Desa yang selama ini dilakukan oleh kami pemerintah dan juga masyarakat di kampung srer.

Yang pertama dalam proses pembuatan program adalah yang pertama lakukan penggalan gagasan dalam kampung ini adalah membuat RPJMD dan juga APBKam dan disitu dilakukan RKP. Artinya rencana program pendek, rencana program menengah dan jangka panjang. Jadi penyusunan program ini nanti lewat dalam pertemuan atau musyawarah, MUSKAM. Disitulah masing-masing ada dibagi awalnya dalam satu kampung ada dibagi dalam tiga RT. Jadi ada RT 1, RT 2, RT 3. Nanti dari setiap RT itu ya mereka mengajukan, mengusulkan dia punya program. Jadi program itu kita buat dalam satu dokumen atau di buat dalam rangkuman, sehingga dibuatlah RKP. Jadi di RKP situ dengan program itu dibuat sehingga dalam prosesnya sampai programnya dibuat dan dikoordinasikan dengan dinas terkait adalah Dinas Pemberdayaan dan juga Dinas PEMKAM untuk mereka sama-sama melihat program ini untuk kita nanti dibahas, dianggarkan di APBD Kabupaten. Jadi itu proses yang dilakukan dalam penyusunan APBD Desa sehingga dengan Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga pusat untuk melakukan pembiayaan atau program sesuai dengan anggaran yang sudah kita lakukan musyawarah bersama. Ya mungkin demikian untuk yang pertama.

Vebby : Ok baik, yang berikutnya e bapa kepala kampung. Ini e siapa sajakah yang berperan dalam proses penyusunan APBDes ini . Mungkin aparat kampung itu sendiri ataukah ada pembentukan lagi e dalam e penyusunan APBDes ini.?

KPK : Iya Baik terima kasih. Ini penyusunan APBDes ini kita di tahun awalnya 2007, Programnya adalah RESPEK dan juga PNPM Mandiri. Di tahun itu PNPM Mandiri itu ada dilakukannya namanya TIP PKK. Tim pengawas atau pembuatan RKP, Pembuatan Program itu namanya dilakukan penggalan gagasan dari setiap warga masyarakat dan langsung disitu dilakukan adalah kepala desa atau kepala kampung, ketua BAPERKAM, dan juga ada 3, ada tim itu sekretaris kampung yaitu verifikasi tim penyusun program sehingga mereka dibuat dalam penggalan gagasan itu untuk nanti di musyawarahkan bersama dengan masyarakat. Tapi di tahun 2014 sampai di 2020, skarang adalah kepala kampung, ketua BAPERKAM, yang berperan penting adalah ketua BAPERKAM. Jadi ketua BAPERKAM dan skarang ada lagi, ada seksi, ada kaur-kaur. Jadi masing-masing membiayai dia punya bidang untuk membuat program ini. Jadi untuk e yang dilakukan adalah mereka ini. Artinya dari struktur

perangkat kampung merekalah yang membuat program ini sehingga nanti lewat musyawarah baru diminta untuk setiap masyarakat untuk memberikan de punya program. Jadi nanti di buat dalam RKPnya. Iya mungkin demikian

Vebby : Ok baik, yang nomor 3 ini saya piker tadi bapa suda jelaskan sedikit tentang bagaimana prosedur e penetapan APBDes yang dilakukan oleh perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa. Mungkin mau ditambahkan sedikit atau sudah cukup.?

KPK : Cukup.

Vebby : Nomor 4 siapa sajakah yang berperan dalam proses penetapan APBDes ini

KPK : Sudah dijelaskan

Vebby : Nomor 5 apabila terjadi ketidak sesuaian didalam hasil evaluasi rancangan APBDes di apa.. kampung srer ini, apasajakah yang perlu bapa dong lakukan, e terkait dalam pengelolaan keuangan desa

KPK : Iya baik terima kasih untuk ke APB Desa yang tidak sesuai dilakukan oleh kami maka yang bertindak disini adalah BAPERKAM. BAPERKAM adalah penyelenggara atau diperkampung untuk melihat disitu kalau tidak sesuai dengan program tidak sesuai dengan anggaran yang dilakukan dalam pembangunan maka harus membuat musyawarah untuk mengevaluasi kenapa tidak berjalan program ini, apa masalahnya, itu yang harus yang berperan adalah ketua BAPERKAM. Jadi BAPERKAM yang bertanggungjawab untuk harus melakukan musyawarah undangan untuk kita harus evaluasi. Jadi tidak berhasilnya kenapa, yang sudah berhasilnya itu harus dilaporkan kepada kepala kampung. Dan kepala kampung melakukan pertanggungjawaban ini sampai kepada Pemerintah Distrik untuk melaporkan ketidak berhasilan itu. Iya makasih.

Vebby : oke baik. Trus e pertanyaan berikutnya. Apakah didesa bapa telah melakukan prosedur perencanaan ini.? Porsedurnya sudah dilakukan ataukah selama ini mungkin etidak berjalan sesuai dengan prosedur terkait pengelolaan e.keuangan desa.?

KPK : Sudah pernah dilakukan waktu kitorang masih ketua BAPERKAM, ada pembangunan yang tidak terlaksana, anggaran tidak terbuka, tidak jelas. Maka sempat melakukan itu musyawarah untuk minta pertanggungjawaban. Artinya evaluasi untuk harus mempertanggungjawabkan dengan program yang sudah dilakukan.

Vebby : Ok baik. Berikutnya yaitu ah.. pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada 8 pertanyaan yang pertama e bagaimana proses e penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan di apa, di kampung srer ini terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa. Jadi seputar Dana Desa saja.

- KPK : Iya baik terima kasih. Ini terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Jadi Dana Desa ini sesuai dengan nanti kita membuat RKP lalu sampai kepada SPT/surat permintaan untuk mengeluarkan Dana Desa sesuai dengan program yang sudah dimuatkan dalam SPTnya itu. Sehingga dengan anggaran itu kita melakukan musyawarah melakukan pembagian sesuai dengan program. Ya ini program yang ada disini sesuai dengan kami di kampung srer ini ada pemekaran kampungnya ada 5. Jadi kampung persiapan. Jadi disini ada lagi yang tahun ini dilakukannya 30% jadi pembagian. Jadi pembagian program di kampung induk dan juga 30% dibagi kepada kampung persiapan. Jadi dalam pembagian itu mereka melakukan program kerja yang laporannya ada di kampung induk. Jadi mungkin demikian seperti itu.
- Vebby : Ok baik. e yang pertanyaan berikutnya apasajakah yang dilakukan oleh aparat kampung terkait penerimaan dan pengeluaran kas desa?. saya piker ini tadi sudah dijelaskan dalam pengelolaan keuangan desa.
- Vebby : e Pertanyaan ke 3 apa sajakah yang dilakukan oleh aparat terkait pengeluaran dan pengelolaan keuangan desa.
- Vebby : pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah proses kegiatan pendanaan atau pembiayaan dalam pengelolaan kegiatan di apa ni e Dana Desa ini.? Mungkin bapa bisa ceritakan sedikit terkait pendanaan kegiatan, program yang sudah disusun itu bagaimanacara apa.. iyo melakukan itu proses kegiatan pendanaan.
- KPK : Iya terima kasih untuk proses atau dokumen yang sekarang kita lagi buat dan siapkan untuk harus koordinasi kedinas terkait sesuai dengan dokumen pelaporan yang kita buat. Kalau memang sesuai dengan anggaran maka kita untuk apa dilakukan itu, namanya.. apa ini. Jadi prose itu dilakukan kalau mereka melihat bahwa sesudah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka harus dilakukan sesuai dengan itu.
- Vebby : Ok baik. Trus e mungkin sedikit ini e pertanyaan lebih spesifik ya itu terkait satu kegiatan. Mungkin kegiatan itu seperti pembangunan rumah, terus dia punya pendanaannya itu bagaimana.? Mungkin bapa bisa ceritakan sedikit terkait dengan itu. Apakah bertahap atukah dia satukaligus. Begitu tahap pertama mungkin berapa persen dulu, tahap kedua dan ketiga.?
- KPK : Iya.. itu terkait dengan untuk pembangunan dan kita sesuai dengan anggaran yang skarang dilakukan adalah dalam bertahap. Jadi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Dulunya masih 2016 sampai 19 tu dibagi dalam persen. Jadi tahap pertama itu 20%, tahap kedua 40, tahap ketiga 40. Tapi untuk tahun 2020 40 %, 40, 20. Jadi dalam proses pembiayaan ini kan kita melihat pembangunan itu. De punya kebutuhannya apa? Baru nanti di program dibagi sesuai dengan anggaran itu. Jadi tidak langsung kita memberikan anggaran atau uang kepada yang punya rumah. Tetapi hanya kepada

mungkin kita bisa kasih mereka untuk belanja untuk makan minum, tapi yang tenaga kerjanya semua ada di bendahara. Jadi prosesnya untuk kita harus melakukan pembiayaan itu kepada suatu pembangunan.

Vebby : Oke baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apasajakah dokumen yang diperlukan dalam proses pendanaan ini.?

KPK : Iya jadi dokumen yang diperlukan dalam proses pendanaan ini itu dokumennya tadi seperti pembuatan RKP nanti disitulah dilaporkan de punya kebutuhan. Kebutuhan disitu dan juga harus melakukan dokumentasi terkait dengan program yang diusulkan. Dokumentasi dan dilakukan pertanggungjawaban sehingga menjadi laporan kepada dinas terkait untuk melihat apakah benar sesuai dengan kebutuhan berjenjang yang mereka lakukan . Jadi macam program ada pembangunan rumah atau penerangan jaringan listrik, air itu butuh dokumentasi tempat, lokasi supaya mereka menjadi bukti atau sampel yang terbukti bahwa benar inilah kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Ya..

Vebby : Pertanyaan berikutnya. Siapa sajakah yang berperan dalam proses pendanaan ini? Apakah yang e sudah dari awal dibentuk atukah mungkin e ada lagi yang e pengurus yang lain? Mungkin bapa kepala kampung bisa jelaskan sedikit.

KPK : Iya baik terima kasih. Untuk di tahun ini kita ada dalam p'raturan PERPRES 84 itu langsung di bagi dalam struktur atau organisasi perangkat kampung itu masing-masing untuk membidangi jadi ada KAUR, Seksi. Jadi yang dulunya bendahara tapi skarang di kasubak keuangan. KASUBAK keuangan itulah bendahara. Jadi masing-masing ini berperan untuk melakukan tugas sesuai dengan yang di apa.. pengurus kita di tahun 2016 sampai 19 itu ada bentuk sebelum musyawarah itu harus ada bentuk de punya tim pengawas artinya tim 7. Untuk tim 7 ini pengawasan untuk anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada kami masyarakat dikampung. Jadi mereka ini bertanggung jawab untuk melakukan survey, melakukan pengawasan ketika anggaran sudah keluar dan dilakukan program itu mereka mengawasi sapa kepada pelaporan.

Vebby : baik pertanyaan berikutnya. e apakah di e kampung ini pernah terjadi, ada perubahan.? Mungkin bapa kepala kampung bisa jadi e bisa jelaskan terkait perubahan APBDes. Mungkin pernah ada terjadi seperti begitu atukah e belum.?

KPK : Iya kita mungkin kita APBDes tahun 2016 tapi dari sebelumnya itu dia masih bergabung. 2007 itu mulainya RESPEK. RESPEK sampai naik kepada PNPM Mandiri dan itu masih anggarannya di bawah standar, masih 400. Nanti 2016 baru dia sampai 700. Dan tahun ini dia hanya berubah cuma mungkin hanya berapa persen saja. Tetap masih, masih 700 untuk APBN. APBD dia sudah berubah. Dulunya 200 tapi sekarang sudah 400. Jadi untuk e perubahan ini sesuai kondisi kita. Mungkin dalam data penduduk, jumlah kebutuhan atau program begitu. Terus lokasi atau geografis yang di

lakukan di setiap kampung. Kita di kampung srer ini memang banyak ini tapi sampai selama ini tidak pernah berubah, jadi kita minta untuk mungkin tahun ini kita juga baru. Pemerintahan baru. Jadi kita usahakan untuk mungkin melakukan yang terbaik sehingga mungkin ada perubahan. Jadi mungkin kita harapkan seperti begitu.

Vebby : Ok. Pertanyaan berikutnya. Apakah perubahan APBDes ini di tetapkan sesuai dengan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa? Maksudnya de sesuai dengan skarang ini dong gunakan apa e.? PERMENDES No.20 tahun 2018/19, pasal 33 itu terkait pengelolaan keuangan desa . De punya yang tadi sudah di sampaikan terkait apa.. pertanggungjawaban itu sampai kepada dari mana kemana e sampai ke bupati taukah dia seputar mungkin sekilasnya seperti begitu. Apakah dia seputar hanya apa badan pemberdayaan kampung ataukah? Jadi apakah de punya perubaha APBDes ini ditetapkan sesuai dengan undang-undang tersebut. Permendes tersebut dengan pasal 33 yaitu 33 itu terkait tong punya apa e laporan pertanggungjawaban itu tong mau kasih sampai dimana.? Dari sini kemana, kemana begitu?

KPK : Iya jadi di tahun ini. Sesuai dengan apa namanya aturan yang baru. Jadi tahun sebelumnya laporannya sampai kepada dinas terkait adalah pemberdayaan. Tetapi tahun ini ada perubahan. Itu informasi yang sementara semua dokumen yang kita dari kampung siapkan, sampai kepada dinas pemberdayaan masyarakat disitu nanti mereka melakukan pelaporan dokumen ini kepada bupati. Sehingga ada satu surat yang langsung diberikan dari bupati kepada kampung tersebut untuk melakukan proses pencairan APBD atau APBN Dana Desa ini langsung dicairkan oleh kampung tersebut. Artinya dulunya dia harus dari pusat tiba di KASDA dulu. Tapi skarang tidak. Ini langsung masuk kepada rekening kampung. Jadi dokumen atau pelaporan ini sampai sebatasnya di dinas pemberdayaan dan dinas pemberdayaan melakukan koordinasi terkait prlaporan ini, dokumen ini kepada bupati. Sehingga bupati melakukan atau membuat surat apa namanya itu, itu langsung ditujukan kepada kampung tersebut untuk langsung ke bank. Ya jadi mungkin seperti begitu.

Vebby : Ok baik e berikutnya yaitu terkait pinatausahaan. Penatausahaan ini dokumen-dokumen macam biasa kalo tong bilang itu tong punya arsip itu di agendakan dengan baik tidak. Pokoknya dia punya garis besarnya seperti begitu terkait pianatausahaan.

Ya yang pertama siapakah pihak yang terkait dalam proses penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa ini.?

KPK : Ya baik terima kasih untuk penatausahaan keuangan desa ini kita sampai sekarang untuk itu masih ada di bendahara. Jadi untuk semua untuk pelaporan, untuk pertanggungjawaban itu ada di bendahara kampung atau bendahara desa dan juga kepala kampung sebagai penanggungjawab. Jadi semua dokumen atau terkait dengan

pelaporan ini kan ada di balai kampung dan juga bendahara yang lebih mengerti. Yang lebih menyimpan ini kan adalah bendahara.

Veby : Ok baik pertanyaan berikutnya. bagaimanakah proses penatausahaan yang dilakukan di desa terkait pengelolaan keuangan e desa. Mungkin terkait dokumen, proses penatausahaan.

Veby : Baik pertanyaan berikutnya bagaimanakah proses penatausahaan yang dilakukan di desa atau dikampung srrer dalam pengelolaan keuangan di desa.?

KPK : Iya jadi untuk proses pengelolaan ini adalah untuk bendahara. Jadi setiap proses anggaran atau dana yang kita programkan untuk kampung srrer, kita lakukan dokumen itu buat untuk pelaporan sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pusat diberikan kepada kita, itu proses pengelolaan oleh bendahara. Jadi bendahara yang berhak untuk mengeluarkan, menyimpan dan melaporkan. Jadi bendaharalah yang bertanggungjawab untuk mengerti, harus memahami tentang proses dalam pelaporan pemerintahan.

Veby : Ok baik pertanyaan berikutnya, apasajakah dokumen yang perlu dibuat oleh bendahara terkait penatausahaan dalam pengelolaan keuangan? Terkait pengelolaan keuangan ini.?

KPK : Iya jadi disini bendahara melakukan adalah yang pertama harus membuat e apa namanya. Buku kas. Buku kas umum untuk semua pengeluaran yang dikeluarkan yang diberikan oleh pemerintah kepada kampung tersebut untuk melakukan pembangunan. Maka itu yang utama adalah buku kas. Sehingga mencatat semua anggaran yang dikeluarkan, anggaran yang di gunakan dalam pembangunan dan disitu juga lakukan apa namanya permintaan. Kalo kita sudah musyawarah melakukan kesepakatan bersama untuk proses mau proses pencairan, maka yang harus disiapkan adalah dokumen-dokumen yang tadi. Untuk harus membuat RAB, harus membuat e SPP, Surat Permintaan, SPJ sampai kepada pelaporan. Dan disitulah nanti dicatat dalam buku kasnya itu. Terima kasih

Veby : Apakah di desa bapa telah menerapkan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa ini? Ataukah masih dalam proses ataukah seperti apa mungkin bapa bisa jelaskan.

KPK : Iya untuk sementara kita juga baru kepala kampung, bendahara jadi kita usahakan untuk di tahun ini lebih mengerti dan lebih melakukan yang terbaik dalam pengelolaan ini. Jadi pengelolaan ini harus semua ini berjalan itu ada pada anggaran yang kita dapat atau menerima dari dinas atau pemerintah, maka disini harus melakukan pengelolaan menjadi arsip yang baik untuk mempertanggungjawabkan ini. Untuk dilaporkan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah melihat bahwa benar-benar kita di kampung

srer sudah bisa untuk, mampu untuk mengelola anggaran ini. Sehingga mereka memberikan bantuan itu. Kalo memang kita tidak melakukan sesuai itu, pasti dia berkurang. Iya

Vebby : Baik. Tahap berikutnya itu tahap pelaporan. e Ada 4 pertanyaan disini. Yang pertama bagaimanakah proses pelaporan yang dilakukan aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa?

KPK : Iya jadi proses pelaporan ini kan ada pada nanti program kalo kita sudah kerja, kita sudah bangun maka disitulah kita mengambil dalam program yang sudah dikelola atau dibangun itu kita melihat melihat kebutuhannya apa yang mereka gunakan itu baru nanti melakukan laporan sesuai dengan itu. Atau macam pembangunan rumah ukuran berapa tipe dengan d punya kebutuhan. Disitulah nanti kita, maka kita disini pasti membutuhkan pendamping teknik karena dia lebih mengerti, lebih memahami. Contoh macam pembangunan dia lebih tahu pembangunan ukuran ini dengan jumlah yang harus digunakan. Trima kasih.

Vebby : Ok. Siapa sajakah pihak yang terkait daslam proses pelaporan ini.?

KPK : Jadi proses pelaporan ini kepala kampung, ketua BAPERKAM, dan bendahara. Jadi mereka, setiap laporan mereka yang melakukan pembuatan laporan dan juga sampai kepada tanda tangan mereka yang bertanggungjawab untuk melaporkann itu. Makasi.

Vebby : Apakah didesa atau di kampung bapa ini telah menerapkan prosedur laporan dalam pengelolaan keuangan? Prosedurnya dari awal sampai akhir itu d sudah berjalan sesuai itu ataukah e belum? Mungkin bisa dijelaskan.

KPK : Iya untuk prosedur yang dilakukan terkait dengan penerapan ini, jadi kita mungkin pemerintahan yang baru, kita jalan pasti kembali kepada program sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka melakukan, setiap kampung itukan dia punya RPJM kampung itu kan 5 tahun. Kalo kita 6 tahun. Berarti mungkin kita bisa menambah dari berapa program lagi dan kita bangun ditahun ini harus sesuai dengan berdasarkan visi misi. Jadi mungkin ada penambahan-penambahan dari program itu, kita bangun harus sesuai dengan visi misi. Itu yang harus diterapkan di kita untuk di tahun ini 2020 sampai dengan rencana untuk pemerintahan ini. Semua yang dilakukan dalam musyawarah pembuatan dokumen RPJMD, APBKam tapi harus sesuai dengan visi misi.

Vebby : Berikutnya siapa sajakah pihak yang terkait dalam proses pertanggungjawaban ini?

KPK : Sebagai pertanggungjawaban ini adalah kepala kampung, bendahara.

Vebby : Ok yang ketiga apasajakah dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pertanggungjawaban?

KPK : Iya dokumennya nanti dalam proses, nanti macam kita tahun 2010 dengan dia punya anggaran yang klo sudah dikeluarkan dalam proses pembangunan. Disitulah yang menjadi laporan adalah sesuai dengan program yang kita lakukan. Yang kita bangun jadi setiap itu dia punya laporan adalah kita harus dokumentasi yang sudah dibangun, trus ada disitu dokumen-dokumen yang perlu ada pembuktiannya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan to.. ada semacam tenaga kerja itu dihitung dalam itu. Untuk membuat laporan. Terima kasih

Vebby : ok baik. e pertanyaan berikutnya. Apakah didesa atau di kampung srer ini e telah menerapkan prosedur pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.?

KPK : Sudah dijelaskan tadi.

Vebby : Iya. Berikutnya mungkin ada sedikit pertanyaan terkait dengan e apa objek wisata sembra mungkin waktu itu e tahun 2018 itu bapa sempat mungkin e ada sedikit mendengar terkait itu pembentukan BUMDES untuk e objek wisata. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang itu dan apakah sampai saat ini e BUMDES itu masi tetap berjalan pada saat pembentukan itu masih tetap berjalan sampai saat ini ataukah seperti apa. Mungkin bapa bisa jelaskan sedikit saja yang menurut bapa tahu

KPK : ya mungkin saya sebelum mungkin menyampaikan terkait dengan BUMDES di tahun 2018 sudah bentuk dia punya pengurus, ini bapa ini sebelum bendahara, dia ketua. Nanti mungkin lebih jelas nanti sebentar. Jadi sudah bentuk dan suda pembiayaan. Sudah dikasih anggaran kepada BUMDES dan mungkin hanya berjalan satu bulan kemudian lalu tidak aktif lagi. Itu yang mungkin karna ketidak partisipasian dalam mendalami BUMDES itu dan mungkin kita kalau lebih ini nanti sebelumnya mungkin nanti bendahara yang lebih tahu karna dia yang kelolah waktu itu jadi mungkin sebatas yang mungkin saya tahu kita sudah memberikan bantuan atau anggaran kepada mereka tapi dia mungkin berjalan satu bulan saja. Entah mungkin ada masalah atau apa. Nanti mungkin lebih jelas nanti sebentar dengan bendahara . Iya

Vebby : Ok baik terima kasih bapa kepala kampung untuk waktunya e dalam wawancara ini terkait proses pengelolaan keuangan desa di kampung srer. Ok terima kasih Tuhan memberkati.

TRANSKIP WAWANCARA

Judul Tesis : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Kasus pada Kampung Srer).
Peneliti : Vebby Rosalina Kareth
Informan : **Sekretaris Kampung**
Jenis : *In-depth Interview*
Tempat/Waktu: , Tanggal, Jam: s/d

Deskripsi

- Vebby : Ok baik e wawancara berikutnya saya akan mewawancara bapa sekretaris e kampung srer e mungkin bapa kepala kampung bisa e apa mperkenalkan diri sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait judul tesis Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Kasus pada Kampung Srer). Baik silahkan bapa
- Sekam : Iya nama saya Marthen kolinggea. Jabatan sekretaris kampung. Trus pekerjaan PNS. Ya sudah kawin, anak ada 5 anak ya skarang sudah umur 47 tahun. Iya itu saja.
- Vebby : Baik bapa itu saja.? Ok kita akan masuk langsung pada pertanyaan yaitu terkait proses pengelolaan keuangan desa di kampung srer. Ada beberapa tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan bapa e yang pertama e bagaimana proses awal penyusunan APBDes yang dilakukan oleh perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa?
- Sekam : Iya perencanaan kita harus dalam perencanaan itu kita ambil data dulu sesuai dengan beberapa titik dikampung dulu kemudian kita penyusunan. Buat kan program baru kita sidasng. Siding BAPERKAM menetapkan dulu baru itu yang hasilnya untuk bikin RPJM. Perencanaan kampung itu dan kita usulkan ke bupati. Jadi begitu.
- Vebby : ok baik pertanyaan berikutnya siapakah yang berperan dalam proses penyusunan APBDes ini? Yang menurut bapa ketahui.
- Sekam : iya. Kalo menurut saya iyu kan perangkat kampung. Kemudian yang kepala kampung , harus sekretaris terlibat, ketua BAPERKAM, kemudian kita libatkakan berapa tokoh dikampung sehingga mereka tahu keberadaan dikampung itu seperti apa itu yang kita susun. Supaya kita buat kan dalam program.
- Vebby : Ok baik e pertanyaan berikutnya apa bila terjadi ketidak sesuaian didalam hasil evaluasi rancangan APBDes itu, apasajakah yang perlu untuk e dilakukan terkait

dalam pengelolaan keuangan ini jika tidak ada kesesuaian di dalam tahapan APBDes itu?

Sekam : Ya kita lihat di program itu kita susun kalo yang tidak terkait dengan dana tersebut kita tidak bisa masukkan karena itu diluar program. Kalo ada dalam program di kampung sesuai dengan petunjuk dari pemerintah seperti apa itu yang kita programkan. Tapi klo diluar dari itu, memang tidak bisa. Kalo dalam APBD kabupaten, a itu bisa di masukkan. Klo APBN tidak bisa.

Vebby : Ok baik terkait dengan ini apa terjadi ketidak kesesuaian, mungkin satu pertanyaan lagi e klo seandainya macam apakah pernah terjadi bahwa sudah ada usulan lalu tiba-tiba sudah terbentuknya APBDes ini, e tiba-tiba ada pengusulan baru. Apakah itu perna terjadi ataukah jika itu terjadi, apa yang bapa dong lakukan dalam hal ini?

Sekam : Ya harus kita buat surat. Dalam program itu klo berubah to berari kita harus minta petunjuk dari atas, dari bupati atau dari pemberdayaan. Supaya petunjuknya seperti apa. Artinya program ini tapi kita rolling dia. Mungkin kita buat program itu tapi diluar dari program yang kita usulkan, a itu tra bisa. Klo memang program dari itu, harus kita buat. Klo di lapangan di kampung baru kita buat program lain itu memang tr bisa.

Vebby : Ok baik em kemudian pertanyaan berikutnya. siapasajakah yang berperan dalam proses e tindak lanjut ini. Dalam proses penetapan APBDes. o ini mungkin terkait dalam tindak lanjut e ketidak sesuaian ini. Itu siapa-siapa saja yang terlibat didalamnya.?

Sekam : Ya itu kepala kampung, sekertaris, ketua BAPERKAM, Bendahara. Harus kita koordinasi deng pihak yang terkait untuk bisa, program ini bisa jalan atau tidak. A itu.

Vebby : Berikutnya. Apakah didesa ini e telah melakukan prosedur perencanaan itu? Kan perencanaan to? Awalnya dari perencanaan, apakah dia sudah melakukan sesuai dengan prosedur perencanaan itu ataukah menurut bapa bagaimana.?

Sekam : Ya ini harus yang tadi saya katakana bahwa kita perencanaan, dari mulai dari perencanaan itu kita buat dulu. Kita ambil data dulu, apakah lihat di kondisi kampung apakah program ini kita masukkan atau tidak. A itu klo memang sepakat dari masyarakat, a itu baru kita kasi masuk dalam program.

Vebby : Tapi dia punya tahapan-tahapan terkait perencanaannya selama ini sudah berjalan ataukah e belum.? Awalnya seperti musyawarah, trus penetapan program, apakah dia sudah selama ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan tahapan-tahapan awal sampai pembentukan APBDes itu. Apakah dia sudah berjalan atau kah?

Sekam : Sudah. Bisa. Ada jalan.

- Vebby : Berikutnya pelaksanaan. Tahap berikutnya pelaksanaan. Pertama bagaimanakah proses penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi Dana Desa itu e d punya proses penerimaannya dan pengeluaran itu seperti apa?
- Sekam : Ya proses e pengeluaran itukan bendahara dengan kepala kampung yang proses sampe pelaporan nanti mereka cairkan uanga dulu. A disitu baru ada berapa orang yang terlibat untuk mengatur, sesuai dengan program yang sudah turun.
- Vebby : Ok baik e mungkin bapa bisa jelaskan sedikit yang menurut bapa, bapa tahu dan paham serta lihat e selama ini terjadi. Bagaimana proses kegiatan pembiayaan. Pembiayaan suatu kegiatan dalam pengelolaan keuangan Desa?
- Sekam : Pembiayaan itu kan kita lihat dari program yang kita susun. Lalu seperti macam rumah. Seperti ini harus kita buat perencanaan. Kemudian kita harus minta tim teknis untuk mereka hitung dulu d punya volumenya. Apakah ini bisa pas dengan dana ini atau tidak? A kita ukur dari itu baru bisa kita kerja. Kalau memang dana lebih dari e rumahnya lebih dari dana memang tra bisa kerja. Pasti blom habis juga.
- Vebby : Ok baik pertanyaan berikutnya. apasaja dokumen e diperlukan dalam proses pembiayaan ini.?
- Sekam : Kan ada dokumen, kemudian laporan dokumentasi, kemudian tahapan laporan harus ada arsipnya sebagai dokumen. Trus buatkan semacam ada pembukuan begitu untuk kearsipan, arsip ada.
- Vebby : siapa sajakan yang berpedan dalam proses pembiayaan satu kegiatan ini dalam dana desa ini?
- Sekam : Iya itu biasanya dibuatkan tim pengawasan untuk mereka kawal supaya betul-betul dana itu betul-betul terapkan kepada program itu. Jadi harus butuh pengawasan. Ya memang kita di pemerintahan kampung juga memang kita punya tugasnya itu harus awasi supaya dana ini betul-betul dikerjakan. Karena itu harus kita di kampung harus bentuk tim juga untuk pengawasan.
- Vebby : Baik e pertanyaan berikutnya apakah perubahan APBDes tadi di poin ke 5 itu terkait ketidak sesuaian itu, e perubahan APBDes ini di tetapkan sesuai dengan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa pasal 33 dan 34 ini terkait pengelolaan keseluruhan keuangan ini fokusnya ke APBDes, perubahan APBDes ini. Apakah itu dia sudah berjalan sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan atukah?
- Sekam : Iya sesuai baru bisa

- Vebby : Berikutnya yaitu tentang penatausahaan. Siapasajakah pihak yang terkait dalam proses penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa? Penatausahaan yang terkait yang tadi bapa bilang yaitu arsip pengarsipan dan lain-lain. Itu siapa-siapa saja yang terlibat didalamnya?
- Sekam : Itu kepala kampung sebagai kepala, kemudian sekretaris, itu harus dan semua pelaporan itu kan di verifikasi oleh sekretaris dulu baru bisa. Ya itu kepala kampung, sekretaris, ketua BPERKAM.
- Vebby : Bagaimanakah proses penatausahaan yang dilakukan di desa. Di kampung sorer ini dalam pengelolaan keuangan desa. Proses penatausahaan mungkin bapa bisa klo tahu sedikit terkait itu bisa dijelaskan.
- Sekam : Ya itu ekonomi kerakyatan berarti kita bisa macam-macam usaha kios itu kita perlu dikasi biaya, kita sponsor dengan dana. Kemudian apa usaha-usaha kayu. Olah kayu, pengolahan olah kayu bisa kita kaksih yang penting usaha itu jalan.
- Vebby : Ok baik pertanyaan berikutnya apasajakah dokumen yang apa perlu dibuat oleh bendahara. Mungkin bapa apa selama sebagai sekretaris kampung bapa pernah terlibat dalam hal ini dan mengetahui sedikit terkait dokumen apa saja yang perlu dibuat oleh bendahara desa terkait e dalam pengelolaan keuangan desa ini?
- Sekam : Dokumen itu harus itu yang kita tadi saya katakan bahwa harus kearsipan itu kan harus ada. A itu kan dokumen setiap kegiatan program yang sudah turun di dokumentasi. Kemudian laporan dari setiap program itu kan ada. Ya harus di arsipkan.
- Vebby : Pertanyaan keempat apakah di desa atau di kampung sorer ini telah menerapkan prosedur penatausahaan selama ini dalam pengelolaan keuangan atau tidak.?
- Sekam : Sa lihat selama ini tidak ada.
- Vebby : Berikutnya itu tahap pelaporan. Pelaporan ini yang pertama, bagaimanakah proses pelaporan selama ini yang bapa dong lakukan. Proses pelaporan yang dilakukan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa ini.?
- Sekam : Iya yang saya minta maaf saja saya cerita sedikit menyangkut kemarin dari 2015 sampai 2020 kan saya lawan politik Cuma langsung mereka tidak melibatkan sekretaris. A itu langsung mereka kerja langsung. Tembak langsung jadi selama ini saya tidak tahu itu prosesnya. Mau bikin apa-apa itu kan saya tidak tahu
- Vebby : Karena bapa sekretaris sudah mengaku tidak terlibat dalam proses pelaporan karena ada masalah dalam politik sehingga untuk pertanyaan selanjutnya tidak saya tanyakan.
- Sekam : Iya

TRANSKIP WAWANCARA

Judul Tesis : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Kasus pada Kampung Srer).
Peneliti : Vebby Rosalina Kareth
Informan : **Bendara Kampung**
Jenis : *In-depth Interview*
Tempat/Waktu: , Tanggal, Jam: s/d

Deskripsi

- Vebby : Saya akan mewawancara bendahara kampung terpilih periode tahun 2020 dan beliau sebelumnya adalah mantan pengurus BUMDES di kampung Srer.
- Bendahara : Iya baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Hendrik Kolenggea. Saya baru pergantian bendahara kampung tahun 2020 bersamaan dengan e kepala kampung terpilih yang baru maka e kita pergantian bendahara baru. Mungkin seperti itu
- Vebby : kita langsung saja ke pertanyaan terkait proses pengelolaan keuangan desa. Ada 5 tahap dari proses perencanaan. Yang pertama perencanaan
- Mungkin bapa bendahara bisa jelaskan yang bapa ketahui terkait proses awal perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa?
- Bendahara : Iya baik e saya juga baru saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Apa itu prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu e kembali kepada kepala kampung, bendahara dan seluruh masyarakat. Ya mungkin ada program-program yang mereka telah tetapkan pada saat e MUSKAM kemudian e mereka penyusunannya sesuai dengan sistematika e penyusunan laporan. Jadi yang disiapkan disitu mungkin RKP, e RPJM, dengan e APBK. Mungkin itu saja yang disiapkan.
- Vebby : Siapa sajakah yang berperan dalam susunan APBDes ini?
- Bendahara : Iya baik terima kasih. Yang berperan didalamnya ialah kepala kampung sebagai penanggungjawab pengguna anggaran, kemudian e bendahara kampung, kemudian sekretaris, ketua BAPERKAM, dan bersamaan dengan struktur aparat kampung.

- Veby : Apabila terjadi kesesuaian dalam hasil evaluasi rancangan APBDes, apasaja yang perlu dilakukan aparat desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Mungkin e bapa bendahara sudah pernah terlibat di dalam hal ini. Klo sudah pernah, mungkin bisa jelaskan sedikit terkait ini.?
- Bendahara : Terima kasih. Mungkin ketidak sesuaiannya semua kembali kepada kepala kampung. Dia memanggil seluruh aparat untuk mereka rapat evaluasi kembali.
- Veby : Siapa saja yang berperan dalam proses tindak lanjut dari pada ketidak sesuaian dalam hasil evaluasi APBDes ini?
- Bendahara : Terima kasih mungkin yang e berperan disitu e kepala kampung dengan bendahara.
- Veby : Apakah didesa ini telah melakukan prosedur tahapan perencanaan ini ataukah belum? Ataukah bagaimana.? Bisa dijelaskan.
- Bendahara : Mungkin perencanaannya mereka sudah lakukan cumin mungkin klo ketidaksesuaian itu makanya mereka duduk kembali untuk evaluasi apakah program-program mana yang sudah berjalan dan mana yang belum berjalan.
- Veby : Tapi menurut pengalaman yang pernah bapa bendahara lihat apakah selama ini prosedur tahapan itu sudah berjalan k belum.?
- Bendahara : Sudah.
- Veby : Pertanyaan terkait tahap pelaksanaan. Bagaimanakah proses penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan terkait terkait pengelolaan keuangan desa?
- Bendahara : Ya terima kasih. Mungkin penerimaannya e kembali pada kepala kampung dan bendahara yang bertanggungjawab. Artinya mereka yang mengelola keuangan itu dari proses pengeluaran e iya penerimaan sampai pada saat pengeluaran. Mereka yang berperan.
- Veby : Ok baik berikutnya, bagaimanakah proses kegiatan pendaan satu kegiatan, pembiayaan satu kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa?
- Bendahara : Iya e terima kasih e pembiayaannya mereka kembali lihat ke program. Melihat ke setiap program. Bidasng mana yang terlaksana mereka lihat sesuai dengan keadaan kampung baru mereka biaya.
- Veby : Ok e berikutnya, apasajakah dokumen yang diperlukan dalam proses pembiayaan e kegiatan ini?

- Bendahara : Ya terima kasih e dokumennya mungkin a pada saat pelaksana e setiap program merek dokumentasi. Mungkin terkait dengan e pembelanjaan ada nota apa begitu mungkin mereka siapkan dan mereka e berikan kepada bendahara dan bendahara melakukan pertanggungjawaban.
- Vebby : Siapa-sajakan yang berperan dalam proses e pembiayaan ini?
- Bendahara : Ya trima kasih itu mungkin e kembali ke bendahara kampung dan kepala kampung yang berwenang.
- Vebby : Apakah didesa terjadi perubahan APBD seperti yang tadi di a perenanaan dalam poin yang ke lima ini? Apakah desa ini pernah terjadi perubahan APBDes ataukah?
- Bendahara : e kalau perubahan mungkin sa kemarinkan baru dilantik bulan januar jadi sa tidak ikuti.
- Vebby : Apakah ABPDes itu di desa ini dia dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI k atau tidak?
- Bendahara : Iya
- Vebby : Pertanyaan penatausahaan. Siapakah pihak yang terkait dalam proses penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa?
- Bendahara : Itu kembali ke bendahara bersama dengan aparat kampung.
- Vebby : Bagaimanakah proses penatausahaan yang dilakukan di desa dalam pengelolaan keuangan desa? dia punya proses atau tahapan dalam penatausahaan itu seperti apa.
- Bendahara : Iya e mungkin yang saya lihat dikampung sini e apa e bidang PKP atau pemberdayaan masyarakat. Disini ibu-ibu pernah ada buat anyaman e anyaman pirin rotan, dengan bunga. Iya itu yang mereka ada kemarin bikin.
- Vebby : Apakah dokumen yang perlu dibuat oleh, dokumen apa saja. Dokumen yang perlu dibuat oleh bendahara terkait e penatausahaan ini dalam pengelolaan keuangan desa?
- Bendahara : Dokumennya mungkin e bendahara mengambil e dokumentasi dari setiap usaha-usaha itu dan dia e apa membuat pertanggungjawaban
- Vebby : Apakah didesa e atau di kampung srer ini telah menerapkan e prosedur penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa atau tidak?

- Bendahara : Iya e disin ada kegiatan penetausaha sebagian yang sudah berjalan, mereka lakukan dan sebagian belum
- Vebby : Ok baik berikutnya tahap pelaporan. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa
- Bendahara : Proses pelaporan ini e semua ini e bendahara yang melakukan. Jadi dia mulai dari tahap e pengelolaan keuangan dokumentasi itu semua atau pembelanjaan mungkin ada nota apa begitu dia pertanggungjawabkan, membuat laporan.
- Vebby : Siapasajakah pihak yang terkait dalam proses pelaporan ini?
- Bendahara : Kalo menurut saya disini itu semua itu kembali ke bendahara dan kepala kampung yang bertanggungjawab.
- Vebby : Apasajakah doumen yang perlu disiapkan dalam proses pelaporan ini?
- Bendahara : Ya dokumennya itu e mungkin e RAB, Laporan pertanggungjawaban, e iya laporan pertanggungjawaban.
- Vebby : Apakah didesa ini telah menetapkan prosedur pelaporan dalam pengelolaan keuangan itu ataukah tidak?
- Bendahara : Mereka e melakukan sesuai dengan tahapannya.
- Vebby : Pertanyaaan terkait pertanggungjawaban. Bagaimanakah proses pertanggungjawaban yang dilakukan aparat desa terkait dalam pengelolaan keuangan desa ini? Tadikan sudah pertanyaan tentang pelapora, sekarang itu pertanyaan tentang pertanggungjawaban.
- Bendahara : Iya pertanggungjawabannya e kembali ke yang tadi bendahara, kepala kampung dan aparat itu mereka e punya tugas untuk mengontrol semua kegiatan yang di kampung untuk mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban.
- Vebby : Siapasajakah pihak yang terkait dalam proses pertanggungjawaban ini? Apakah ada pihak yang baru ataukah masih tetap?
- Bendahara : Iya e klo e pertanggungjawaban, mungkin e skarang sudah pergantian jadi ya mungkin bendahara yang baru, kepala kampung baru, dan aparat yang baru, sama ketua BAPERKAM.
- Vebby : Apasajakah dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pertanggungjawaban?
- Bendahara : e yang kita siapkan itu e RKP, RPJM, dengan APBKam, iya trus e dengan laporan pertanggungjawaban.

Vebby : Apakah didesa atau dikampung srer telah menerapkan prosedur pertanggungjawaban yang tadi ada bapa keatau itu ataukah belum?

Bendahara : Iya sudah sementara proses pertanggungjawaban yang tahap ke tiga.

Vebby : Berikutnya itu pertanyaan seputar e BUMDES yang tahun 2018 itu mungkin bisa ceritakan sedikit terkait apa, dari perencanaan BUMDES itu sampai pada pertanggungjawaban. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , sampai pertanggungjawaban itu mungkin bapa bisa jelaskan terkait e dalam hal ini ojek wisata Sembra.

Bendahara : Iya trima kasih e pada tahun 2018 itu kita membentuk tim BUMDES. Ada ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota. Kemudian kita sudah dibiayai 100Jt. Kemudian kita belanja perlengkapan sekertariat. Terus kita apa iya belanja e alat renang kemudian dengan e bahan kios. Dengan kita membuat tagih e apa pajak e karcis di kali sembra. Ya kita sudah kerja sama dengan dinas pariwisata, sudah berjalan bagus sampai dengan tiga bulan tapi dari mereka bilang kita e proses tagi karcin ini sama-sama, keuangannya dinas pariwisata yang simpan. Iya mereka simpan sampai suda e tiga bulan kita kesana mau tanya, mereka bilang nanti nanti. Tidak tahu itu saya mau ke kepala kampung juga, kepala kampung dia putar begini-begini. Akhirnya ketua BUMDES dengan ketua anggota sudah lihat begitu akhirnya mereka malas. Karna e sapa juga, tra mungkin kita manusia kerja tidak makan. Artinya cape kerja baru orang lain dapat itu kan.

Kemudian klo bahan usaha kios, ada saya punya anggota dia usaha-usaha. Pada saat itu dia sakit. Dia sakit, langsung sakit yang brat e kemudia dia sakit, sudah fokus semua itu tu sudsah kita sudah tidak tahu lagi. Urus d sakit saja akhirnya langsung meninggal. Jadi semua hilang jejak. Jadi BUMDES dia sementara mati/tidak berjalan.

Vebby : ok baik kalo Terkait pengelolaan, apakah ada kendala terkait hak ulayat tanah? Bap abisa jelaskan.

Bendahara : Klo hak ulayat tanah sudah. Itu tidak jadi masalah. Kita sudah bicara dengan pri bumi yang iya. Jadi kita sudah bagi, nanti kita sama-sama bagi. Ya anti kita bagi ini kamu punya sebagian, kita dengan wisata punya. Tapi kita punya, BUMDES punya dengan wisata punya nanti pariwisata yang kelola. Mereka simpan selama tiga bulan itu sudah tidak ada tanda-tanda. Akhirnya macet.

Vebby : Tapi selama ini apakah pariwisata masih (ini pertanyaan ini saya sudah keluar dari pada itu) tetapi selama ini pariwisata masih macam tagih retribusi itu ataukah.?

Bendahara : Sudah tidak ada. Cuma yang punya hak ulayat yang biasa ada tagih-tagih di sembra itu. Tapi kita tidak tahu proses mereka denga pariwisata. Apakah bagi dua ataukah tidak. Klo untuk BUMDES, kita sudah tarik. Stop

Vebby : ok baik itu saja wawancara saya dengan bendahara kampung. Terima kasih pak bendahara sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tuhan memberkati

Bendahara : Terima kasih.

TRANSKIP WAWANCARA

Judul Tesis : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: (Studi Kasus pada Kampung Srer).
Peneliti : Vebby Rosalina Kareth
Informan : **Pendamping Distrik**
Jenis : *In-depth Interview*
Tempat/Waktu: , Tanggal, Jam: s/d

Deskripsi

Vebby : Informan kali ini adalah Pendamping distrik (PD) dan beliau akan memperkenalkan diri. Silahkan.

PD : Ok baik terima kasih nama saya Rahmad Iriyandi lokasi tugas saya sebagai Pendamping Distrik di Kabupaten Sorong Selatan.

Vebby : Baik kita akan membahas terkait proses pertanggungjawaban Dana Desa. ada beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yaitu perencanaan kemudian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam perencanaan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana prosedur susunan APBDes e yang dilakukan oleh desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa?

PD : Secara singkat proses perencanaan penyusunan APBDes atau APBK kampung e itu dimulai dari proses musyawarah perencanaan. Jadi kita ada musyawarah pengusulan, kemudian masyarakat menyampaikan usulan, kemudian dalam rancangan Anggaran kegiatan atau rencana anggaran biaya, kemudian setelah disosokkan dengan pagu indikatif desa, kemudian kita adakan yang namanya musyawarah pengambilan keputusan. Dan disitulah e tahap awal pembentukan APBDes atau APBKam.

Vebby : Siapa sajakah yang berperan dalam proses penyusunan APBDes ini.?

PD : Dalam proses penyusunan sebenarnya kita tidak bisa bilang dalam proses penyusunan karna adanya dalam e proses. Klo proses penyusunan pastinya harusnya tim e tim perumus atau tim perencana. Cuma kalau dalam musyawarah yang hadir itu pasti unsurnya dari unsure masyarakat, kemudian dari perangkat desa, pendamping lokal desa, pendamping distrik, dan BAPERKAM.

- Vebby : Bagaimana prosedur penetapan APBDes yang dilakukan oleh desa terkait pengelolaan keuangan desa?
- PD : Ya terkait dengan proses penetapan itu semua kegiatan yang dilakukan di desa itu berdasarkan hasil musyawarah. Jadi kalau kita sudah trima usulan dimusyawarah pengusulan, kita hitung usulan itu kita buat Rencana Anggaran Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja. Kemudian kita lakukan lagi musyawarah berikutnya yaitu musyawarah penetapan. Musyawarah penetapan itu berarti kegiatan-kegiatan yang nilai-nilai belanja atau nilai-nilai RABnya sudah keluar, sehingga tidak ada kelebihan anggaran dalam proses perbelanjaan.
- Vebby : Pertanyaan ke empat siapa sajakah yang berperan di dalam proses penetapan APBDes ini?
- PD : Untuk proses penetapan sebenarnya semua yang hadir dalam musyawarah ikut terlibat tapi tanda tangan yang dibubuhkan tanda tangan dalam dokumen yang pasti itu kepala kampung, dan ketua BAPERKAM yang mengesahkan dokumen perencanaan.
- Vebby : Apabila terjadi ketidaksesuaian di dalam hasil evaluasi rancangan APBDes, apa saja yang perlu dilakukan aparat di desa terkait dalam pengelolaan keuangan desa?
- PD : Ok baik. Apabila dalam ketika tahap pertama penyusunan APBDes atau APBK Kampung sudah ditetapkan, kemudian dikemudian hari ternyata ada perubahan maka kita harus mengulang proses dari awal yaitu proses musyawarah. Kumpul dengan masyarakat lagi untuk dibicarakan hal-hal yang perlu diubah dan ditetapkan kembali.
- Vebby : Kemudian dalam apa ketidaksesuaian ini, hasil evaluasi rancangan APBDes yang tidak sesuai ini siapa saja yang berperan dalam proses itu.?
- PD : Sama seperti proses penyusunan awal. Semua terlibat. Mulai dari unsur masyarakat, perangkat desa, BAPERKAM, Pendamping lokal desa, Pendamping Distrik, semua mengambil bagian dalam proses perubahan APBDes atau APBKam itu.
- Vebby : Apakah di desa atau di kampung ini telah melakukan prosedur pelaksanaan itu atau?
- PD : Untuk di kabupaten Sorong selatan khususnya di distrik tempat saya bertugas 100% kampung sudah melakukan semua tahapan itu. Karena kita kira kalau banyak mungkin anggapan, karena kalau kita tidak melakukan musyawarah perencanaan otomatis semua usulan itu tidak bersumber dari masyarakat, pasti bisa diprediksi bahwa dikemudian hari pasti banyak akan banyak perubahan. Karena usulan itu tidak berasal dari masyarakat. Makanya harus diadakan proses-proses itu harus dilalui.

Vebby : Berikutnya itu tahap pelaksanaan. Pertanyaan pelaksanaan. Pertama bagaimakah proses penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan di desa terkait pengelolaan keuangan desa?

PD : Untuk proses penerimaan. Penerimaan kita bahas yang pertama dulu. Penerimaan untuk proses penerimaan yang pastinya e untuk pencairan tahap pertama itu selaku kepala kampung dan bendahara harus menyiapkan dokumen awal terdiri dari , RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) beserta dengan surat permintaan pembayaran, kemudian diajukan kepada sekretariat P3MD, kemudian dari sekretariat P3MD melakukan validasi, kemudian diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau PD terkait untuk mengeluarkan rekomendasi pencairan, baru dilakukan pencairan di kampung. Kemudian masuk kepada tahap pengeluaran, ketika uang itu di trima oleh bendahara maka biasanya bendahara dengan kepala kampung akan pulang ke kampung kemudian membawa serta uang yang telah dicairkan kemudian sampaikan kepada masyarakat uang yang telah dicairkan itu akan di belanjakan untuk apa. Berdasarkan dengan surat permintaan pembayaran yang disampaikan pada tahapan awal sebelum pencairan.

Vebby : Pertanyaan ketiga dari tahapan pelaksanaan. Apa saja yang dilakukan terkait pengeluaran desa dalam pengelolaa keuangan desa?

PD : Untuk proses pengeluaran keuangan desa yang sebelumnya saya sudah sampaikan jadi begitu mereka sudah pencairan kemudian uangnya dibawah kekampung dan harus ada musyawarah lagi karena harus uang nominalnya itu harus disampaikan kepada masyarakat sebelum di serahkan kepada tim pelaksana kegiatan harus di sampaikan kepada masyarakat dulu pos-pos apa yang telah dicairkan. Karna proses pencairan sendiri untuk dana desa ada 3 tahap dan itu berdasarkan surat permintaan pembayaran yang disampaikan oleh kampung kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Vebby : Bagaimana proses kegiatan pembiayaan dalam pengeluaran keuangan desa?

PD : Untuk proses pembiayaan kegiatan karena sebelumnya kita sudah melakukan proses perencanaan jadi pos-pos kegiatan itu nilainya sudah ada semua. Jadi begitu pencairan, kita hanya serahkan kepada tim pengelola kegiatan. Jadi tim pengelola kegiatan inilah yang bertanggungjawab untuk membelanjakan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah termuat dalam rancangan APBK atau RKP

Vebby : Dokumen yang diperlukan dalam proses pendanaan ini, apa-apa saja.?

PD : Dokumen. Secara umum dokumen tiap tahap berbeda-beda tentunya. Untuk Dana Desa sendiri kita ada proses pencairan itu ada 3 tahap. Untuk tahap pertama sekali atau tahap awal itu dokumen yang diperlukan itu tentu saja RKP atau rencana kerja

pemerintah desa. Didalamnya ada berita acara musyawarah desa, ada daftar hadir musyawarah, ada surat keputusan kepala kampung, ada peraturan kampung, dan masih banyak lagi. Tentunya yang berkaitan dengan APBK. Kemudian ada lagi dokumen APBK. Dokumen APBK itu berisi tentang RAB-RAB rinci kegiatan. Jadi semua kegiatan di breakdown, dijabarkan setiap kegiatannya, nilai-nilainya berapa saja, kemudian apa yang mau dibelanjakan semua termuat dalam APBK.

Kemudian untuk proses tahap ke dua dan tahap ke tiga ini relative. Yaitu mempertanggungjawabkan penggunaan dan sebelumnya. Berupa laporan pertanggungjawaban dan surat permintaan pembayaran untuk tahap berikutnya

Vebby : Siapa sajakan yang berperan dalam proses pembiayaan kegiatan ini?

PD : Sumber keuangan atau dana yang masuk ke kampung itu ada beberapa sumber. Untuk kita di sorong selatan sebenarnya ada 3 sumber yaitu ada dari Dana Desa atau dari APBN, Kemudian ada Alokasi Dana Desa dari APBD, kemudian ada Otsus atau dana RESPEK atau skarang disebut dengan dana Prospek.

Yang berperan dalam kegiatan ini yang pastinya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sama Pemerintah Provinsi.

Vebby : Apakah di desa itu terjadi perubahan APBDes

PD : Selama saya menjadi pendamping distrik Alhamdulillah belum pernah ada terjadinya perubahan karna tugas kita adalah mengawal setiap a karna kita melakukan setiap tahapan-tahapan proses perencanaan sebagaimana mestinya supaya meminimalisir terjadinya perubahan-perubahan itu. Kemudian kita di wilayah sorong selatan juga bukan daerah e yang rawan bencana sehingga e pendanaan-pendanaan untuk kegiatan tak terduga itu sangat minim. Jadi semua bisa dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan diawal.

Vebby : Pertanyaan terkait penatausahaan.. Yang pertama siapasajakah pihak yang terkait dalam proses penaausahaan dalam pengelolaan keuangan desa?

PD : Untuk proses penatausahaan, pastinya bendahara. Jadi semua kegiatan ini di tatausahakan oleh bendahara desa, diketahui atau diverifikasi oleh sekertaris desa, kemudian mengetahui kepala kampung atau kepala desa.

Vebby : Bagaimana proses penatausahaan yang dilakukan di desa dalam pengelolaan keuangan desa?

PD : Untuk proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Untuk proses pelaporannya dimulai karna tadi uangnya disampaikan/ diberikan kepada tim pengelola kegiatan, maka semua dokumen itu dipertanggungjawabkan oleh tim pengelola kegiatan.

Disampaikan kepada bendahara desa, mengetahui kepala kampung/kepala desa, baru semua diarsipkan oleh bendahara untuk dilaporkan menjadi dokumen pertanggungjawaban desa.

Veby : Apasaja dokumen yang perlu dibuat oleh bendahara desa terkait penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa ini?

PD : Untuk dokumen penatausahaan pengelolaan keuangan desa ini itu didalamnya ada buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu kegiatan itu bersumber dari iap-tiap penggunaan dana yang bersumber dari tim pengelola kegiatan tadi atau TPK, kemudian ada buku bank untuk mendata semua bukti transaksi keluar masuk keuangan dalam rekening desa, kemudian ada buku kas pajak atau buku pelaporan pajak.

Veby : Apakah di desa e telah menerapkan proses penatausahaan dalam keuangan desa atau?

PD : Ya sudah. Untuk semuanya kita sudah sesuai mulai dari buku bank dan lain sebagainya. Jadi kalau didalam sebelum mereka mengambil dokumen rekomendasi pencairan ke tahap berikutnya, kita ada checklist untuk e tiap-tiap dokumen tadi.

Veby : Pertanyaan berikutnya terkait pelaporan. Yang pertama, bagaimanakah proses pelaporan yang dilakukan desa terkait pengelolaan keuangan desa.

PD : Untuk pelaporan, sebenarnya proses pelaporan inikan disampaikan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada e kegiatan musyawarah. Jadi mulai dari proses perencanaan, proses pencairan, kemudian hingga proses pertanggungjawaban itu dilakukan dalam forum musyawarah supaya e dilakukan secara transparan mungkin.

Veby : Untuk pelaporan ini e siapa sajakah pihak yang terkait dalam proses ini?

PD : Untuk e proses pelaporan dari kalo dari desa kepada prosesnya dari desa kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang bertanggungjawab tentu saja tim pelaksana kegiatan, kemudian bendahara desa, kepala kampung, dan sekertaris desa. kalau untuk e dari kampung kepada masyarakat e semua unsur harus terlibat karena kita bentuknya musyawarah jadi semua unsure yang di tahap perencanaan itu semua harus hadir dan bendahara wajib untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa.

Veby : Pertanyaan berikutnya. Apasajakah dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pelaporan ini?

PD : Dokumen sebenarnya cuman satu dokumen saja yang kita e pake untuk proses pelaporan keuangan desa yaitu laporan pertanggungjawaban, cuman didalam laporan

pertanggungjawabannya itu ka nada surat pengantar, ada e surat keputusan kepala kampung mengenai laporan pertanggungjawaban, kemudian ada e buku kas. Ada buku-buku kas namanya buku bank, buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pajak, buku bank, daftar hadir musyawarah, trus musyawarah pertanggungjawaban semua ada di dalam dokumen. Jadi dokumennya sebenarnya cukup satu cumin didalamnya banyak lampiran.

Vebby : Apakah didesa telah menerapkan prosedur pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa?

PD : Untuk distrik yang saya tangani Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai e apa yang diamanatkan oleh baik melalui PERMENDAGRI, PERMENDES maupun PERMEN e keuangan tentang penatausahaan keuangan desa ini.

Vebby : Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan didesa terkait dalam pengelolaan keuangan desa ini?

PD : Untuk proses pertanggungjaan yang saya sudah sampaikan sebelumnya jadi pertanggungjawaban proses pertanggungjawaban terbesar perangkat desa itu dibagi atas dua yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawban kepada masyarakat. Jadi untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah itu melalui dokumen-dokumen yaitu dokumen e laporan pertanggungjawaban. Sedangkan e untuk kepada masyarakat hanya disampaikan saja bahwa kegiatan-kegiatan apa yang telah dilaksanakan atau kegiatan apa yang akan dicairkan untuk tahap berikutnya dan apa saja yang sudah di laksanakan begitu.

Vebby : Siapasajakah pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban ini?

PD : Untuk proses pertanggungjawaban ya sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau ke pemerintah daerah ya tadi itu TPK selaku pengguna anggaran secara langsung, kemudian bendahara kampung atau bendahara desa sebagai pemegang kas desa kemudian kepala kampung atau kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran, terus mengetahui juga sekertaris desa, kemudian ada juga BAPERKAM atau BPD badan permusyawaratan desa sebagai keterwakilan masyarakat dalam unsure pemerintahan desa.

Vebby : Apakah dokumen yang disiapkan apakah sama dengan pelaporan ataukah?

PD : Ya sama

Vebby : Apakah didesa telah menerapkan prosedur pertanggungjawaban selama ini atau?

PD : Iya untuk proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa karna mau tidak mau mereka harus mengikuti prosedur. Karena setiap tahap itu ketika mereka

tidak desa atau kampung tidak mampu atau tidak bersedia melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan maka proses pencairan kepada tahap berikutnya tidak bisa dilaksanakan atau ditunda untuk sementara waktu sampai kampung atau desa tersebut siap melengkapi dokumen-dokumen pertanggungjawaban.

Vebby : Baik terima kasih. Demikian wawancara saya dengan pendamping distrik.

PD : Terima kasih.